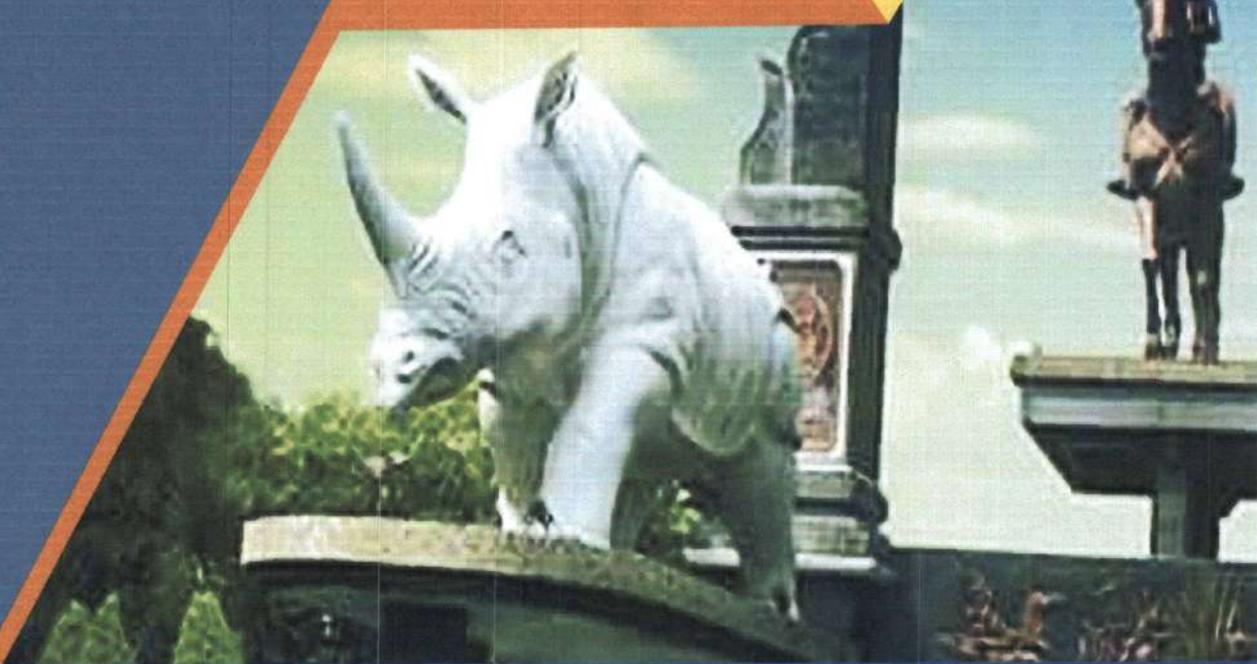




PEMERINTAH KABUPATEN  
PURWAKARTA



# RENJA 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURWAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja ini disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan guna mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana kerja ini disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan guna mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Untuk mewujudkan sinergitas dan pencapaian prioritas pembangunan telah dirumuskan pula tujuan bersama ( common goals), yaitu : ***Salapan Langkah Ngawangun Nagri Raharja dan Tujuh belas Prinsip Kahuripan Purwakarta***, yang telah menjadi komitmen semua pihak dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Purwakarta (RPJMD ) 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dan Rencana Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator Program yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Purwakarta. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

### **1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan Dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara adapun tugas rinci.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta di Pimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu :

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Kepala Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan

4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang masing-masing membawahi 3 (Tiga) Seksi.

### **1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran**

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta (RPJMD ) 2018-2023.

21. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
22. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2022;
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penulisan Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Urusan wajib bukan pelayanan dasar Sesuai dengan prioritas program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2021 akan dilaksanakan 4 (empat) Program yang dijabarkan dalam 37 kegiatan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 17.036.458.662,- (*tujuh belas milyar tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*).

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 dan 2021, antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kegunaan administrasi kependudukan,
2. Kurangnya tenaga pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika,
3. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pendukung program proses penerbitan administrasi kependudukan,

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri terhadap dokumen kependudukan/masih banyak menggunakan jasa perantara/calor.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja PD Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) sesuai urusan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020 s/d 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

## Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 Kabupaten Purwakarta

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program tahun berjalan 2021	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah I s.d II Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran</b>							
	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	100	100	100	-	-
	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana aparatur	100	100	100	100	-	-
	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100	100	100	100	-	-
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	-	-
	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	-	-
<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>							
	Pemutakhiran biodata penduduk	100	100	100	100		-
	Sosialisasi kebijakan kependudukan	100	100	100	100		-

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
Tingkat Akurasi Data Kependudukan	-	-	-	-	-	-	90
Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	90
Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	90
Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan	-	-	-	-	-	-	90
Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	-	-	-	-	-	-	90
Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	-	-	-	-	-	-	90

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam kerangka analisis kinerja pelayanan terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui, yaitu data internal dan eksternal. Sedangkan penetapan indikator kerjanya diukur secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

**Tabel 2.2**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI			CATATAN
		2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	100	100	100	100				
Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100				
Presentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	100	100	100	100	100	100				
Presentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	%	100	100	100	100	100	100				

perkantoran											
Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100				
Pemutakhiran biodata penduduk	%	100	100	100	100	100	0				
Sosialisasi kebijakan kependudukan	%	100	100	100	100	100	0				

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.3 Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD**

Isu – isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan hambatan OPD, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta senantiasa dipengaruhi oleh isu – isu penting yang bersifat strategis baik berupa kondisi, keadaan atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tahun 2021 tingkat pelayanan perangkat daerah masih tergolong cukup baik, walaupun ada beberapa kegiatan harus mengalami penundaan pelaksanaannya.

### **2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD**

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, khususnya pada kinerja pelayanan administrasi kependudukan selama ini dapat diidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam prosedur memperoleh dokumen administrasi kependudukan yang sesuai aturan;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya data kependudukan;
3. Kebijakan kependudukan yang berubah – ubah;
4. Perubahan system pelayanan kependudukan belum bisa dipahami/dimengerti oleh masyarakat;
5. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas;
6. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional pelayanan administrasi kependudukan yang

mengakibatkan belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan;

7. Masyarakat kurang memahami akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil; dan
8. belum tersosialisasikannya kebijakan kependudukan secara menyeluruh.

### **2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD**

Dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah juga harus memanfaatkannya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelayanan publik prima yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau yang lebih kita kenal dengan istilah e- Government tersebut sebaiknya bukan hanya sekedar mengikuti trend global melainkan juga merupakan suatu langkah strategi dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat, e-government dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi dan mendapat berbagai pelayanan tanpa harus datang ke instansi pemerintah terkait. Keterbukaan Informasi juga akan mending terciptanya good government dalam pemerintahan karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga – lembaga public, selain itu e-government juga diharapkan dapat memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat dilakukan dengan peningkatan perilaku aparatur untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan, menyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan, membuat inovasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga menjadi efektif dan efisien, serta mengembangkan sistem pelayanan administrasi yang online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.

Dengan adanya pelayanan secara Online yang dapat di akses oleh semua lapisan masyarakat diharapkan akan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu lagi datang berbondong-bondong ke Disdukcapil hanya untuk mendapatkan dokumen kependudukan, masyarakat bisa mengakses dimanapun dan kapanpun mereka memerlukan dokumen kependudukan. Sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

#### **2.3.4 Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan isu – isu nasional dan regional

Dari isu – isu penting tersebut dapat kami formulasikan dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana seperti yang dianjurkan oleh pemerintah pusat yakni pengadaan ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) sehingga masyarakat tidak harus berbondong – bonding datang datang ke disdukcapil hanya untuk sekedar mencetak dokumen kependudukan;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan IT untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan secara online;
3. Peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas dari aparat pelaksana;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan berupa akta – akta pencatatan sipil, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, maupun kartu keluarga;

5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap terjadinya peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
6. Peningkatan pelayanan prima akan terwujud dengan adanya dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan berkualitas serta didukung oleh tenaga pelaksana (tenaga IT) yang memadai; dan
7. penempatan Korwil/operator di setiap kecamatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD**

Indikator kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu, pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja, keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Sedangkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 berdasarkan sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pada sasaran ini indikator sasarannya meliputi indeks kepuasan masyarakat;
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan  
Adapun indikator sasarannya meliputi :
  - a. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan
  - b. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil
3. Tersedianya akurasi database kependudukan
4. Meningkatnya pelayanan perkantoran

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Di samping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
Kabupaten Purwakarta

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				17,036,458,662	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				17,036,458,662
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				60,000,000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				60,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	30,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	30,000,000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				12,015,000,000	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				12,015,000,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	106 Orang	12,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	106 Orang	12,000,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	15,000,000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				470,000,000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				470,000,000

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Tersedianya pakaian olahraga dan batik	212 Stel	170,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Tersedianya pakaian olahraga dan batik	212 Stel	170,000,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	250,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	250,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pegawai yang mengikuti BINTEK	120 Orang	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pegawai yang mengikuti BINTEK	120 Orang	50,000,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>2,889,458,662</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>2,889,458,662</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	65,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	65,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Peralatan Gedung yang dibutuhkan	5 item	2,144,458,662	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Peralatan Gedung yang dibutuhkan	5 item	2,144,458,662
			Jumlah Perlengkapan Gedung yang dibutuhkan	7 item				Jumlah Perlengkapan Gedung yang dibutuhkan	7 item	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan	40 item	30,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan	40 item	30,000,000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	38 Jenis	365,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	38 Jenis	365,000,000
			Jumlah Makan dan Minum Tamu dan Rapat Kantor yang dibutuhkan	950 Box				Jumlah Makan dan Minum Tamu dan Rapat Kantor yang dibutuhkan	950 Box	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	9 Jenis	75,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	9 Jenis	75,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	130 HOK	210,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	130 HOK	210,000,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>160,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>160,000,000</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	160,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	160,000,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,225,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,225,000,000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Bahan Surat Menyurat yang dibutuhkan	900 Materai	125,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Bahan Surat Menyurat yang dibutuhkan	900 Materai	125,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Rekening yang dibayarkan perbulan	9 Rekening	750,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Rekening yang dibayarkan perbulan	9 Rekening	750,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	24 OB	350,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	24 OB	350,000,000

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>217,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>217,000,000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	11 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	11 Unit	25,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Unit Kendaraan Roda 2	36 Unit	160,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Unit Kendaraan Roda 2	36 Unit	160,000,000
			Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Unit Kendaraan Roda 4	12 Unit				Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Unit Kendaraan Roda 4	12 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung secara berkala	15 Unit	32,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung secara berkala	15 Unit	32,000,000
			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	20 Unit				Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	20 Unit	
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>				<b>262,000,000</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>				<b>262,000,000</b>
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>65,000,000</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>65,000,000</b>

	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Frekwensi Kegiatan Pelayanan Kependudukan Keliling (Jemput Bola)	17 Kali	65,000,000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Frekwensi Kegiatan Pelayanan Kependudukan Keliling (Jemput Bola)	17 Kali	65,000,000
	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>67,000,000</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>67,000,000</b>
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Kependudukan	100 Persen	67,000,000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Dokumen Kependudukan	100 Persen	67,000,000
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>130,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>130,000,000</b>
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Banner	20 Set	130,000,000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Banner	20 Set	130,000,000
Iklan			1 Paket	Iklan				1 Paket		
Spanduk			10 Lembar	Spanduk				10 Lembar		
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				<b>63,000,000</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				<b>63,000,000</b>
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>				<b>63,000,000</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>				<b>63,000,000</b>
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	frekwensi Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling (Jemput Bola)	17 Kali	63,000,000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	frekwensi Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling (Jemput Bola)	17 Kali	63,000,000

	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				<b>1,875,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				<b>1,875,000,000</b>
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>				<b>255,000,000</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>				<b>255,000,000</b>
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		3 Perangkat	55,000,000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah		3 Perangkat	55,000,000
			Jumlah Dokumen Kependudukan	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Kependudukan	1 Dokumen	
			Jumlah Peserta Pembinaan	50 Orang				Jumlah Peserta Pembinaan	50 Orang	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah pemanfaatan data oleh lembaga pengguna dan jumlah perangkat keras/lunak penunjang kerjasama pemanfaatan data kependudukan	5 Lembaga	200,000,000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah pemanfaatan data oleh lembaga pengguna dan jumlah perangkat keras/lunak penunjang kerjasama pemanfaatan data kependudukan	5 Lembaga	200,000,000
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>1,575,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>1,575,000,000</b>
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan SIAK	20 Unit	1,300,000,000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan SIAK	20 Unit	1,300,000,000

			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan SIAK	20 Item				Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan SIAK	20 Item	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pengembangan Inovasi Pelayanan berbasis Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Jenis	220,000,000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah Pengembangan Inovasi Pelayanan berbasis Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Jenis	220,000,000
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	200 Orang	55,000,000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	200 Orang	55,000,000
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>45,000,000</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>45,000,000</b>
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Frekwensi Pembinaan ke Kecamatan	17 Kecamatan	45,000,000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	Frekwensi Pembinaan ke Kecamatan	17 Kecamatan	45,000,000

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam Perencanaan Program/Kegiatan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui dua macam perencanaan yaitu Bottom Up dan Top Down. Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang telah didahului dengan musrenbang tingkat desa adalah untuk menampung usulan masyarakat yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan di OPD. Pada Tahun 2022 terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme musrenbang dan telah ditelaah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

**Tabel. 2. 4**  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<b>NIHIL</b>					

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tahun 2022 arah kebijakan pembangunan Nasional bertumpu pada 9 prioritas pembangunan yang lebih dikenal dengan Nawacita sebagaimana yang telah dicanangkan presiden. Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta disesuaikan dengan Nawacita terutama cita ke dua yaitu Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi – institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa

yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

Tujuan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Manajemen Perkantoran Secara Optimal</li> <li>2. Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>3. Terwujudnya Pemanfaatan Data</li> </ol>
Sasaran :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>2. Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan</li> <li>3. Meningkatnya Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil</li> <li>4. Meningkatnya Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan</li> </ol>

### 3.3. Program dan Kegiatan

Kode					Program/ Kegiatan
1				2	
<b>2</b>	<b>12</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
2	12	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	2.02		<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	2.03		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

<b>2</b>	<b>12</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	2.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	2.03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	2.04		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>
2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rumusan dan rencana program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada Tahun 2022 dan prakiran maju di Tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 terdapat 4 (empat) program yang tersajikan dalam 14 (empat belas) kegiatan, yang disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Kode					Perangkat Daerah/Bidang Urusan/ Program /Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
2	12	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				17,036,458,662	APBD		18,728,104,528
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60,000,000	APBD		66,000,000
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	2 Dokumen	30,000,000	APBD	2 Dokumen	33,000,000
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Dokumen	30,000,000	APBD	1 Dokumen	33,000,000
2	12	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				12,015,000,000	APBD		13,216,500,000
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	106 Orang	12,000,000,000	APBD	106 Orang	13,200,000,000
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Dokumen	15,000,000	APBD	1 Dokumen	16,500,000
2	12	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				470,000,000	APBD		505,000,000
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian olahraga dan batik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	212 Stel	170,000,000	APBD	212 Stel	175,000,000
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	15 Jenis	250,000,000	APBD	15 Jenis	275,000,000
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti BINITEK	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	120 Orang	50,000,000	APBD	120 Orang	55,000,000
2	12	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				2,889,458,662	APBD		3,178,404,528

2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	15 Jenis	65,000,000	APBD	15 Jenis	71,500,000
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung yang dibutuhkan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	5 item	2,144,458,662	APBD	5 item	2,358,904,528
						Jumlah Perlengkapan Gedung yang dibutuhkan		7 item			7 item	
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	40 item	30,000,000	APBD	40 item	33,000,000
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	38 Jenis	365,000,000	APBD	38 Jenis	401,500,000
						Jumlah Makan dan Minum Tamu dan Rapat Kantor yang dibutuhkan		950 Box			950 Box	
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	9 Jenis	75,000,000	APBD	9 Jenis	82,500,000
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	130 HOK	210,000,000	APBD	130 HOK	231,000,000
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>160,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>176,000,000</b>
2	12	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	1 Unit	160,000,000	APBD	1 Unit	176,000,000
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,225,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>1,347,500,000</b>
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bahan Surat Menyurat yang dibutuhkan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	900 Materai	125,000,000	APBD	900 Materai	137,500,000
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan perbulan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	9 Rekening	750,000,000	APBD	9 Rekening	825,000,000
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	24 OB	350,000,000	APBD	24 OB	385,000,000

2	12	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>217,000,000</b>	APBD		<b>238,700,000</b>
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	11 Unit	25,000,000	APBD	11 Unit	27,500,000
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Unit Kendaraan Roda 2	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	36 Unit	160,000,000	APBD	36 Unit	176,000,000
				Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Unit Kendaraan Roda 4		12 Unit		12 Unit				
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung secara berkala	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	15 Unit	32,000,000	APBD	15 Unit	35,200,000
				Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung		20 Unit		20 Unit				
2	12	2			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>				<b>262,000,000</b>	APBD		<b>288,200,000</b>
2	12	2	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>65,000,000</b>	APBD		<b>71,500,000</b>
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Frekwensi Kegiatan Pelayanan Kependudukan Keliling (Jemput Bola)	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	17 Kali	65,000,000	APBD	17 Kali	71,500,000
2	12	2	2.02		<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>67,000,000</b>	APBD		<b>73,700,000</b>
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	100 Persen	67,000,000	APBD	100 Persen	73,700,000
2	12	2	2.03		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>				<b>130,000,000</b>	APBD		<b>143,000,000</b>
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Banner	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	20 Set	130,000,000	APBD	20 Set	143,000,000
				Iklan		1 Paket		1 Paket				
				Spanduk		10 Lembar		10 Lembar				
2	12	3			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>				<b>63,000,000</b>	APBD		<b>69,300,000</b>

2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				63,000,000	APBD		69,300,000
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	frekwensi Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling (Jemput Bola)	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	17 Kali	63,000,000	APBD	17 Kali	69,300,000
2	12	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				<b>1,875,000,000</b>	APBD		<b>2,062,500,000</b>
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				255,000,000	APBD		280,500,000
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	3 Perangkat	55,000,000	APBD	3 Perangkat	60,500,000
					Jumlah Dokumen Kependudukan		1 Dokumen	1 Dokumen				
					Jumlah Peserta Pembinaan		50 Orang	50 Orang				
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pemanfaatan data oleh lembaga pengguna dan jumlah perangkat keras/lunak penunjang kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	5 Lembaga	200,000,000	APBD	5 Lembaga	220,000,000
2	12	4	2.03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>1,575,000,000</b>	APBD		<b>1,732,500,000</b>
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan SIAK	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	20 Unit	1,300,000,000	APBD	20 Unit	1,430,000,000
					Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan SIAK		20 Item	20 Item				
2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Pengembangan Inovasi Pelayanan berbasis Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	3 Jenis	220,000,000	APBD	3 Jenis	242,000,000
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	200 Orang	55,000,000	APBD	200 Orang	60,500,000
2	12	4	2.04		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				<b>45,000,000</b>	APBD		<b>49,500,000</b>

2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Frekwensi Pembinaan ke Kecamatan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Tengah	17 Kecamatan	45,000,000	APBD	17 Kecamatan	49,500,000
---	----	---	------	---	--	----------------------------------	---	--------------	------------	------	--------------	------------

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Rencana tindaklanjut PD

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 mendatang akan menetapkan 4 program dan 14 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta



**Drs. H. Sulaeman Wilman, M.Si**  
NIP. 19620429 198903 1 005